



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

DIAN ANDRIANI
1925100602

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DIAN ANDRIANI
NPM : 1925100602
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN)

MEDAN, DESEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamilah, SE, M.Si)



(Dr. Onny Meddine, SH, M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si)

PEMBIMBING II

(Anggi Pratama, SE, M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : DIAN ANDRIANI
NPM : 1925100607
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN)

MEDAN, DESEMBER 2021

KETUA

(AULIA, SE, MM)

ANGGOTA II

(ANGGI PRATAMA, SE, M.Si)

ANGGOTA I

(DWI SARASWATI, S.Pd, M.Si)

ANGGOTA III

(MIKA DEBORA, S.Pd, M.Si)

ANGGOTA IV

(Drs. MULKANUDDIN, MM, Ak)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Andriani
NPM : 1925100602
Fakultas/ Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN)


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Desember 2021


Dian Andriani
1925100602

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Beranda tangan di bawah ini :

Nama	: DIAN ANDRIANI
Tgl. Lahir	: TEBING TINGGI / 11 Maret 1983
NPM	: 1925100602
Jurusan	: Akuntansi
Spesialisasi	: Akuntansi Sektor Bisnis
Alamat yang telah dicapai	: 138 SRS, IPK 3.43
No. HP	: 081269444084

Mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PENGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN)

Menyetujui Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tempat dan Waktu



Rektor I,

(Cahyo Prasno, S.E., M.M.)

Medan, 17 Juni 2021

Pemohon,

(Dian Andriani)

Tanggal :



(Dr. Onny Madeline, S.P., M.Kn.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dwi Setiawati, S.Pd., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Sa. Prodi Akuntansi

(Dr. Rahim Purba, SE., Mgr., Ak. CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Anngi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Formulir: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 937/PERP/BP/2021**

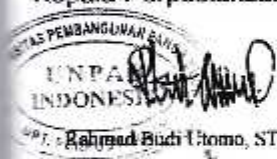
Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: DIAN ANDRIANI
: 1925106602
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Studi : Akuntansi

sejak terhitung sejak tanggal 22 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 November 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Dr. Rahmad Budi Utomo, ST., M. Kom

Referensi: FM-PERPUS-06-01

: 01

Revisi : 04 Juni 2015

Permohonan Meja Hijau:

Medan, 08 Desember 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN ANDRIANI
 Tanggal/Tgl. Lahir : TEBING TINGGI / 11 MARET 1983
 Orang Tua : TURINO
 NPM : 1925100602
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 Alamat : 081269444034
 Lokasi : JL. SEI BABURA NO. 32 KOTA TEBING TINGGI

bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH MEDAN)**. Selanjutnya saya menyatakan :

Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan

Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan index prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.

Telah tercapai keterangan bebas pustaka

Terlampir surat keterangan bebas laboratorium

Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih

Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.

Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar

Sketsa sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah ditandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan

Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)

Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)

Telah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Disetujui oleh :

Hormat saya



Medaline, S.H., M.Kn
 Fakultas SOSIAL SAINS

DIAN ANDRIANI
 1925100602

Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :

- a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybr



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Dwi Saraswati, S.pd, M.Si
 Pembimbing II :
 Mahasiswa : DIAN ANDRIANI
 Program Studi : Akuntansi
 NIM : 1925100602
 Pendidikan : S-1
 Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDY EMPIRIS PADA ORGANISASI PEMANGKAT DAERAH KEMEND MEDAN

NO	REVISI	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1	2021	- Laporan Pelatcan - Lampiran Kuesioner		

Medan, 19 Juni 2021

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Pembimbing I : ANGGI PRATIHA NASUTION, SE, M, Si
Pembimbing II : DIAN ANDRIANI
Mahasiswa : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1925100602
Tingkat Pendidikan : S-1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH Kota MEDAN.

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1	Cover Daftar Isi Konsistensi ketipec Konsistensi tabel / Gambar awak BAB, Halaman & baris Format 4, 3, 3, 3 kerangka konseptual Daftar pustaka	[Signature]	
2	Acc Lembar Pengantar PB II	[Signature]	

3/8/2021

Medan, 19 Juni 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Drs. Orny Medaline, SH., M.Kn



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpeb@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing II :
 Nama Mahasiswa : DIAN ANDRIANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1925100602
 Bidang Pendidikan : S-1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDY EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMFID MEDAN)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	FARAF	KETERANGAN
3 Juli 2021	- Latar Belakang - Lampirkan kuesioner		
Juli 2021	Tambahkan teori yang lebih update		
03/2021	Lampirkan kuesionernya		
07/2021	ACC Seminar Proposal		

Medan, 19 Juni 2021

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing II :
 Nama Mahasiswa : DIAN ANDRIANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1925100602
 Bidang Pendidikan : A-1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH Kota Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11/11/2021	Tampilkan hasil uji statistik di Abstrak Acc sidang		Acc Meja Ligan

Medan, 19 November 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I :
 Dosen Pembimbing II : ANGGI PRATAMA NARUTION SE, MSi
 Nama Mahasiswa : DIAN ANDRIANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1925100602
 Bidang Pendidikan : S-1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENPENGARI KUALITAS
 LAYANAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS
 PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH Kota MEDAN

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11/11/2021	<p> <i>Acc sidy sup</i> <i>PR II</i> <i>Angg Prata MSi</i> </p>		

Medan, 19 November 2021
Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Acc
Drs. R. L. L. L.



Acc
Ing
17/01/2022

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

DIAN ANDRIANI
1925100602

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Ace
DPT
Mega Rizan
20/11/2021

2
Ace sdy smpn di ps II

PB
11/1/2021
A. W. P.



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

DIAN ANDRIANI

1925190602

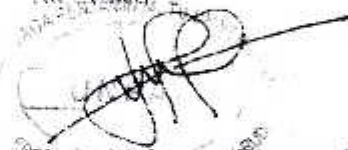
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU U.NPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi/Thesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan

Nilai Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku U.NPAB

No. 1/PS/11
KEMAHAMAHAN RITONGA

Hasri Muhtarrit Ritonga, B.A. MSc
KEMAHAMAHAN RITONGA

No. Dokumen: PML-UJMA-06-02 Revisi: 00 Tgl Eff: 23 Jan 2019

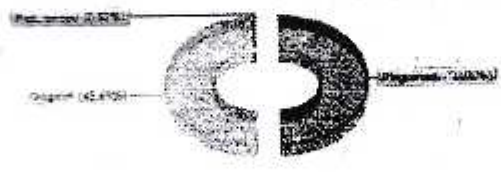
Plagiarism Detector - Originality Report 10/06/2023 11:02:00

DIAN ANDRIANI_1025100602_AK.JNTANSI.docx Universitas Pembangunan Panca Budi_license03

- ① Rewrite
- ② Internet Check [see_and_end_value]



Plagiarism Detector - Originality Report



③ [see_and_end_value]



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN ANDRIANI
Tempat / Tanggal Lahir : Tebingtinggi / 11-03-1983
NPM : 1925100602
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL. SEI BABURA NO. 32

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



DIAN ANDRIANI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas. Populasi dalam penelitian adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara dari 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode penentuan sampel dengan metode sensus, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian sejumlah 70 orang. Data dalam penelitian adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, uji parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1) didapatkan nilai $t_{hitung} 4,532 > t_{tabel} 1,668$ dengan signifikansi $0,00 < 0,05$, sistem pengendalian internal (X_2) nilai $t_{hitung} 3,046 > t_{tabel} 1,668$ dengan signifikansi $0,00 < 0,05$, kompetensi sumber daya manusia (X_3) nilai $t_{hitung} 2,056 > t_{tabel} 1,668$ dengan signifikansi $0,04 < 0,05$, dan peran audit internal (X_4) dengan nilai $t_{hitung} 2,753 > t_{tabel} 1,668$ dengan signifikansi $0,00 > 0,05$, yang berarti secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan (Y). Hasil uji secara simultan diperoleh nilai $F_{hitung} 12,63 > F_{tabel} 2,36$ dengan signifikansi $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti secara simultan variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Audit Internal.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of the implementation of government accounting standard, internal control system, human resource competence, and the role of internal audit on the quality of the Medan city government's financial statement. The type of research used is causality research. The population in this study were Financial Administration Officers (PPK) and treasurers of 35 Regional Apparatus Organizations (OPD). The method of determining the sample is the census method, so that all members of the population are used as research samples of 70 people. The data in this study are primary data with data collection techniques using questionnaires. The hypothesis was tested by using multiple regression analysis with an SPSS software program. The result of the research showed that the partial test of the variable implementation of government accounting standard (X_1) obtained t_{count} value of 4,532 > t_{table} 1,668 with significance of $0,00 < 0,05$, internal control system (X_2) t_{count} value of 3,046 > t_{table} 1,668 with significance of $0,00 < 0,05$, human resource competence (X_3) t_{count} value of 2,056 > t_{table} 1,668 with significance of $0,04 < 0,05$ and the role of internal audit (X_4) t_{count} value of 2,753 > t_{table} 1,668 with significance $0,00 > 0,05$ which means that partially the independent variables had positive and significant influence on the quality of Medan city government's financial statement. Simultaneous test results obtained F_{count} 12,63 > F_{table} 2,36 with significance $0,00 < 0,05$. This means that simultaneously the independent variables had positive and significant influence on the quality of Medan city government's financial statement.

Keywords: Quality of Financial Statement, Implementation of Government Accounting Standard, Internal Control System, Human Resource Competence, the Role of Internal Auditor.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan)**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca budi
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Ibu Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan saran dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.

6. Seluruh Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Akuntansi atas segala ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada saya.
8. Jajaran Pemerintah Kota Medan serta seluruh responden pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian.
9. Teristimewa Suami saya dr. Faisal Anshary Tobing dan anak-anak saya yang selalu setia mendampingi dan mendukung pendidikan saya.
10. Teman-teman Program Studi Akuntansi yang saling mendukung untuk penyelesaian pendidikan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Medan, Desember 2021

Dian Andriani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian	13
1.4.2 Manfaat Penelitian	14
1.5 Keaslian Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Konseptual	37
2.4 Hipotesis	40
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2.1 Lokasi Penelitian	42
3.2.2 Waktu Penelitian	42
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
3.4.1 Variabel Penelitian	44
3.4.2 Definisi Operasional	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Teknik Analisa Data	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Analisa Deskriptif	57
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian	57
4.1.2 Karakteristik Responden	58
4.1.3 Hasil Distribusi Jawaban Kuisisioner	62
4.2 Uji Kualitas Data	68
4.2.1 Uji Validitas	69

4.2.2 Uji Realibilitas	74
4.3 Uji Asumsi Klasik	75
4.3.1 Uji Normalitas	75
4.3.2 Uji Multikolinearitas	77
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	78
4.4 Regresi Linear Berganda	79
4.5 Uji Hipotesis	81
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	85
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara	5
Tabel 1.2 Daftar kelemahan Sistem Pengendalian Intern	7
Tabel 1.3 Keaslian Penelitian	16
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian	42
Tabel 3.2 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian	43
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel	47
Tabel 4.1 Distribusi Kuisisioner	58
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	59
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan Pendidikan	59
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	60
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/ Golongan	60
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	61
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Kursus/ Diklat	61
Tabel 4.9 Hasil Distribusi Jawaban Responden Untuk Kuisisioner SAP	62
Tabel 4.10 Hasil Distribusi Jawaban Responden Untuk Kuisisioner SPI	64
Tabel 4.11 Hasil Distribusi Jawaban Responden Untuk Kuisisioner Kompetensi SDM	65
Tabel 4.12 Hasil Distribusi Jawaban Responden Untuk Kuisisioner Peran Audit Internal	66
Tabel 4.13 Hasil Distribusi Jawaban Responden Untuk Kuisisioner Kualitas ... Laporan Keuangan	67
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas	69
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas	74
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas	76
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinieritas	77
Tabel 4.18 Hasil Uji Glejser	78
Tabel 4.19 Hasil Regresi Linear Berganda	79
Tabel 4.20 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji – T)	82
Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji – F)	83
Tabel 4.22 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015-2019	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	37
Gambar 4.1 Grafik Normalitas Dengan P-P Plot	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dan harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik, sehingga pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara diwajibkan untuk menerapkan prinsip *good governance* yang mana pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD 1945 (Sahya Anggara, 2016).

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam suatu periode (Peraturan pemerintah No.8 Tahun 2006)

Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik.

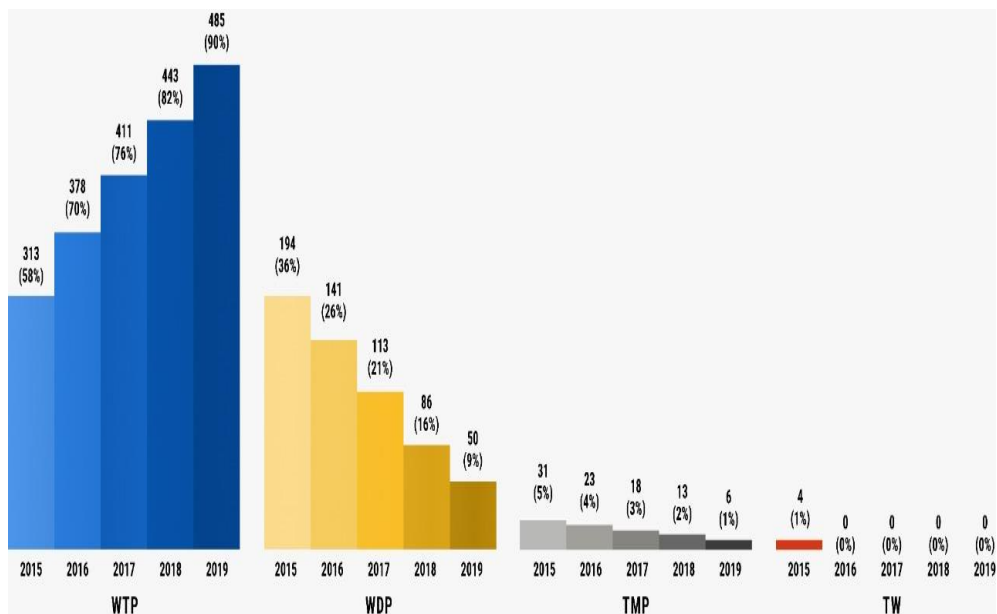
Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah kepada publik harus disajikan secara berkualitas agar memberikan informasi laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi yang diberikan laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Mudah dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan yang berkualitas diperlukan untuk digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola organisasi. Oleh karena itu, setiap tahunnya

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertujuan untuk memberikan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); c) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); 3) Tidak Wajar (TW); dan 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Untuk itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi cermin bagi keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika BPK memberikan opini WTP dapat diartikan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan memenuhi kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan didalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Jones, 2014).

Namun kenyataan di lapangan, masih ada pemerintah daerah yang belum mencapai opini WTP untuk laporan keuangannya. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2020 terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, BPK RI memberikan 485 opini WTP (90%), 50 opini WDP (9%), dan 6 opini TMP (1%). Perkembangan opini LKPD dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015 s.d. 2019



Sumber: IHPS I BPK RI Tahun 2020

Untuk LKPD Tahun 2019 yang belum memperoleh WTP, menurut hasil pemeriksaan BPK disebabkan masih adanya permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun-akun dalam laporan keuangan dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti yang dijumpai dalam LKPD tahun 2019 antara lain pada akun aset lancar, akun aset tetap, belanja operasi dan belanja modal. Selain ketidaksesuaian dengan SAP, BPK juga mengungkapkan temuan disebabkan adanya permasalahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang salah satunya disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia.

Opini BPK terhadap Pemerintah Kota Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat melalui Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 -2019**

No	Entitas Pemerintah	2015	2016	2017	2018	2019
	Daerah					
1	Kota Binjai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Gunung Sitoli	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Medan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kota Padang Sidempuan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kota Pematang Siantar	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP
6	Kota Sibolga	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
7	Kota Tanjung Balai	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
8	Kota Tebing Tinggi	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber: IHPS I BPK RI Tahun 2020

Obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan, dimana BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD Kota Medan selama 5 Tahun berturut-turut dari Tahun 2015-2019. Dari hasil pra riset yang saya lakukan, menurut pengamatan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertugas menyusun laporan keuangan pemerintah kota Medan, masih banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran OPD yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi dan belum sepenuhnya memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selain itu masih belum memadainya penatausahaan persediaan dan aset tetap, serta belum optimalnya usulan anggaran belanja OPD. Disamping itu, belum maksimalnya peran audit internal dalam melakukan pengawasan untuk mengurangi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan diduga juga menjadi sebab belum tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2020 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2019, ditemukan

adanya ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti yang dijumpai dalam LKPD Tahun 2019 antara lain terdapat pada akun:

- a. Aset Lancar dimana Kas di kas daerah disajikan tidak sesuai dengan SAP yang berdampak pada lebih saji kas di Neraca dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang cukup.
- b. Belanja Modal dimana terdapat kelebihan pembayaran belanja modal kepada penyedia jasa atas kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah sehingga realisasi belanja modal diakui tidak sesuai dengan SAP yang berdampak pada lebih saji aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Neraca. (LHP BPK RI Tahun 2020).

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Oleh karena itu, kesesuaian dengan SAP menjadi salah satu kriteria dalam pemberian opini BPK dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Penerapan SAP yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan saat ini oleh instansi pemerintah merujuk pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/asset yang transparan dan akuntabel.

Selain ditemukannya akun yang tidak disajikan sesuai SAP, hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019 juga menemukan 5.175 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.729 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.338 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.108 permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal (IHPS I BPK RI, 2020).

Beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditemukan oleh BPK dalam Laporan Keuangan Kota Medan dapat dilihat dalam tabel 1.2

Tabel 1.2. Daftar Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Kota Medan Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun 2019

Tahun	Kelemahan SPIP
2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kas daerah belum tertib; 2. Penatausahaan kas dibendahara pengeluaran belum tertib; 3. Belanja daerah tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; 4. Pengelolaan piutang reklame tidak tertib; 5. Pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan piutang retribusi sewa bangunan tidak tertib; 6. Pengelolaan persediaan belum memadai; 7. Penerimaan dana bergulir terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); 8. Penyajian realisasi belanja barang dan jasa obat-obatan pada RSUD dr. Pirngadi TA 2014 tidak sesuai SAP dan diantaranya tidak memiliki dasar hukum; 9. Pengelolaan aset tetap belum memadai.
2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pelaporan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum tertib; 2. Penghapusan piutang pajak tidak didukung keputusan Walikota dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Penyajian nilai kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum menunjukkan nilai yang wajar; 4. Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak divalidasi dan terlambat dipertanggungjawabkan; 5. Kesalahan penganggaran belanja hibah direalisasikan dari anggaran belanja pegawai serta anggaran belanja barang dan jasa.

2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak rasional dan pembayaran kewajiban tidak sesuai dengan ketentuan; 2. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan secara tertib; 3. Kesalahan penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat; 4. Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum sesuai ketentuan; 5. Pengelolaan aset tetap belum memadai
2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak rasional serta pergeseran anggaran tidak sesuai ketentuan; 2. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Pirngadi belum memadai; 3. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan secara tertib; 4. Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum sesuai ketentuan; 5. Pengelolaan persediaan belum memadai; 6. Pengelolaan aset tetap belum memadai.
2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kas belum tertib 2. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan secara tertib; 3. Pengelolaan persediaan belum memadai; 4. Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai; 5. Pencatatan penyertaan modal belum memadai; 6. Pengelolaan aset tetap belum memadai; 7. Pengelolaan pajak hotel dan restoran belum optimal; 8. Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) belum tertib; 9. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) belum memadai; 10. Kesalahan penganggaran pendapatan hibah, belanja hibah, dan belanja modal.

Sumber: BPK RI: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun 2015 s.d. 2019

Setiap OPD memerlukan pengendalian internal yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian internal yang semakin baik akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat keterandalan yang semakin tinggi. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan dalam membuat laporan keuangan, mengamankan asset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Pengendalian internal yang rendah akan mengakibatkan berbagai kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sulit dideteksi sejak dini, sehingga pada akhirnya bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, et al. 2010)

Badan Pemeriksa Keuangan RI mengungkapkan permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian, pengguna barang belum optimal dalam melakukan penatausahaan aset tetap dan persediaan, dan belum disusunnya pedoman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab (IHPS I BPK RI Tahun 2020:90).

Kompetensi SDM juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu diperlukan sumber daya aparatur yang kompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. SDM yang berkompeten akan dapat memahami logika akuntansi dengan baik. Gagalnya SDM di pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2009). Kompetensi

aparatur adalah faktor yang sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SAP dan SPIP adalah manusia (Indriasih, 2014).

Dalam rangka penilaian ketepatan pelaksanaan kebijakan organisasi dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan, maka peran pengawas/audit internal sangat diperlukan, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif terutama yang berkaitan dengan LKPD. Peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi kriteria relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penelitian Lasmara dan Rahayu (2016) menyatakan kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hadi dan Darwanis (2017) menyatakan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Menurut penelitian Kewo dan Afiah (2017) sistem pengendalian internal dan audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan. Begitu juga penelitian Kabib, dkk (2021) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi Sumber Daya Manusia dan peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin (2014) yang menyatakan kompetensi SDM dan peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kurniawan (2016) menyatakan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan penelitian Fikri, dkk (2016) menunjukkan penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Didasari oleh uraian latar belakang dan fenomena pada Pemerintahan Kota Medan di atas serta inkonsistensi dari hasil penelitian beberapa peneliti sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan).**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penyajian akun aset lancar dan belanja modal pada Laporan Keuangan Kota Medan.
2. Terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Laporan Keuangan Kota Medan.
3. Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian.
4. Kurangnya Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan adanya kesalahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan terdapatnya kelemahan dalam sistem pengendalian Intern (SPI) atas Laporan Keuangan Pemko Medan.
5. Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi pegawai.
6. Belum maksimalnya peran audit internal dalam mengawasi, mereview dan mengevaluasi laporan keuangan OPD.

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini hanya pada analisis beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan antara lain Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Audit Internal.

Batasan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk LKPD Tahun 2015-2019 disebabkan pada saat

penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Mei 2021, hasil audit BPK atas LKPD Tahun 2020 belum diumumkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka permasalahan yang akan dianalisis peneliti adalah:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan?
4. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan?
5. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.

2. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.
4. Untuk menganalisis pengaruh Peran Audit Internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.
5. Untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Aspek Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi terutama mengenai kualitas laporan keuangan.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Kota Medan, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang pentingnya penerapan SAP, sistem pengendalian internal, kompetensi SDM, dan peran audit internal dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi pihak Fakultas.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lasmara dan Rahayu (2016) dengan judul: “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan).”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Model Penelitian

Dalam Penelitian terdahulu menggunakan model pengaruh untuk 4 (empat) variabel dengan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini menggunakan model pengaruh untuk 5 (lima) variabel dengan regresi linear berganda.

2. Variabel Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel independen (kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung, peran auditor internal) dan 1 (satu) variabel dependen (kualitas laporan keuangan). Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen (penerapan

SAP, Sistem Pengendalian Internal, kompetensi SDM, peran audit internal) dan 1 (satu) variabel dependen (kualitas laporan keuangan)

3. Jumlah Observasi/sampel

Penelitian terdahulu berjumlah 108 pegawai sedangkan penelitian ini berjumlah 70 pegawai.

4. Waktu Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2021.

5. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian terdahulu di lakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Medan.

Tabel 1.3 Keaslian Penelitian

Kriteria	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Variabel Independen	Kompetensi SDM, Perangkat Pendukung, Peran Audit Internal	Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM, Peran Audit Internal
Variabel Dependen	Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas Laporan Keuangan
Jumlah Observasi/ Sampel	108 orang pegawai	70 orang pegawai
Waktu Penelitian	2016	2021
Lokasi Penelitian	Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci	Pemerintah Daerah Kota Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam teorinya sebagai berikut. “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. Artinya, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu tindakan atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Didalam pemerintahan, penerapan teori keagenan ini dapat dilihat didalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana pemerintah sebagai agen yang dipilih dan dipercaya oleh publik untuk bekerja dan membuat keputusan bagi kepentingan publik, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan wewenang atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan publik sebagai prinsipal kepadanya dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah (agen) dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak publik (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2006).”

Bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada publik tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD yang merupakan representasi perwakilan rakyat sebagai prinsipal yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Mengawasi kinerja pemerintah adalah hal mutlak bagi publik, agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Lane, 2003).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan adalah sebuah bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara selama satu masa (periode). Hal ini dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu merupakan laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, tanggung jawab pelaporan keuangan daerah diselenggarakan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah (PEMDA) yang meliputi satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan

asersi (pernyataan) dari pihak pemerintah yang memberikan informasi kepada pihak lain yakni para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah (Permendagri No.4 Tahun 2008). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 26 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dalam menilai akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya yang berdampak pada keputusan yang diambil di bidang ekonomi, sosial, atau politik. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan realisasi dengan anggarannya yang mencakup unsur pendapatan – LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang menyajikan informasi mengenai perubahan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. Neraca yang menyajikan informasi posisi keuangan entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

- e. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai nilai ekuitas awal, surplus/defisit LO dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas serta nilai ekuitas akhir dari pemerintah daerah.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera dalam LRA, LO, Neraca, LPE, LPSAL, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika informasi yang disajikan bermanfaat bagi para pemakainya dan berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan dapat dinilai relevan apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi disebut relevan jika:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi menyebabkan pengguna dapat menegaskan atau mengoreksi ekspektasi (harapan) mereka dimasa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi akan membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi yang diberikan tepat waktu akan sangat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah yang tersaji dengan lengkap akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Keandalan Informasi dalam laporan keuangan akan tercapai apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi bisa saja relevan, tetapi jika keandalan penyajian tidak terpenuhi maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Semua informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda,

hasilnya harus menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi harus bersifat netral dan untuk kebutuhan umum, tidak boleh berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Karakteristik lain yang menunjukkan sebuah laporan keuangan berkualitas adalah komparatif atau dapat dibandingkan, karena informasi yang tersaji akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun laporan keuangan entitas pelaporan lainnya sepanjang diterapkannya kebijakan akuntansi yang sama.

Laporan keuangan yang dapat dipahami juga merupakan syarat agar laporan keuangan dikatakan berkualitas, yaitu jika informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu diasumsikan pengguna memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dilihat dari variabel yang digunakan didalam penelitian. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan berbagai variabel antara lain Kewo dan Afiah (2017) meneliti dengan 2 (dua) variabel yaitu Sistem Pengendalian Internal dan Internal Audit. Lasmara dan Rahayu (2016) meneliti dengan menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, dan Peran Auditor Internal. Irzal dan Suparno (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu Penerapan

Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kabib, dkk (2021) meneliti dengan menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Peran Auditor Internal. Hadi dan Darwanis (2017) meneliti dengan menggunakan 4 (empat) variabel yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Fikri, dkk (2016) meneliti 4 (empat) variabel yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel moderating. Febri, dkk (2019) melakukan penelitian dengan 4 (empat) variabel yaitu Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP dengan Akuntabilitas sebagai variabel intervening.

Berdasarkan berbagai variabel penelitian terdahulu tersebut, peneliti fokus melakukan penelitian pada 4 (empat) variabel yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal. Alasan pemilihan variabel tersebut yaitu untuk variabel Penerapan SAP dan SPI merupakan kriteria dalam pemberian opini oleh BPK sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Variabel Kompetensi SDM diperlukan dalam penerapan SAP dan SPI. Agar pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan SAP dan SPI yang dilakukan oleh pegawai bagian keuangan/akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan peran Audit Internal untuk mereview dan mengevaluasi laporan keuangan setiap OPD.

2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian, 2006). SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat dengan KSAP yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dan disajikan sesuai dengan SAP agar bermanfaat bagi pengguna untuk mendapatkan informasi tentang nilai sumber daya ekonomi yang dikelola untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap entitas pelaporan, pemerintah pusat maupun daerah wajib untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan dalam suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan saat ini oleh pemerintah

merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada lampiran I yang terdiri atas Kerangka Konseptual dan PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP No. 03 tentang laporan arus kas, PSAP No. 04 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP No. 05 tentang akuntansi persediaan, PSAP No. 06 tentang akuntansi investasi, PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP No. 09 tentang akuntansi kewajiban, PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, PSAP No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasian dan PSAP No. 12 tentang laporan operasional.

Dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang benar didalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan penyajian yang material dapat dihindari sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan disajikan dengan berkualitas.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal

merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Rai, 2011:283).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern (SPI) terdiri atas unsur 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Resiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; dan 5) Pemantauan. Kelima unsur ini terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi pondasi dari pengendalian adalah SDM didalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Lingkungan Pengendalian merupakan hal yang sangat penting bagi terselenggaranya unsur pengendalian yang lain. Unsur ini mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif agar meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman bagi pegawai sehingga menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai dalam mewujudkan pengendalian internal didalam organisasi. Hal ini dapat terwujud dengan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatannya, komitmen pimpinan terhadap kompetensi pegawai dibidangnya masing-masing, kepemimpinan yang kondusif sebagai pemberi teladan yang dipatuhi oleh seluruh pegawai,

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat kepada pegawai, penyusunan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi tercapai, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan menciptakan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Untuk menciptakan kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan diatas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif dimana pemimpin selalu mengambil keputusan berdasarkan pada data hasil penilaian resiko. Penilaian resiko dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi resiko atas resiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tersebut, kemudian menganalisis resiko yang memiliki kemungkinan kejadian dampak yang sangat tinggi sampai dengan resiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil penilaian resiko, maka kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon resiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan respon tersebut efektif.

Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Terpenuhinya unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal oleh instansi pemerintah, akan tercermin dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dapat tercapai dan laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki tingkat keterandalan yang tinggi. Pengendalian intern bertujuan membuat laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*) (Tuanakotta, 2013).

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian Kompetensi dijelaskan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Kharis, 2010).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, peran sumber daya manusia memegang peranan penting. Hal ini tercermin dari keterlibatan SDM dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, kompetensi dalam bidang akuntansi sangat diperlukan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara, dan staf keuangan/akuntansi. Kompetensi ini bisa diperoleh dari jenjang pendidikan, pelatihan, seminar, bimbingan teknis keuangan, dan pengalaman. Kemampuan SDM ini diperlukan

untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga kekeliruan dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dapat dihindarkan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

2.1.6 Peran Audit Internal

Audit internal merupakan salah satu fungsi organisasi yang bertugas menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan *assurance* yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola yang baik. (IIA, 1999).

Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal menjelaskan tentang aktivitas audit internal yaitu jasa konsultasi (*Consulting*) dan jasa asuransi (*assurance*). Jasa konsultasi/*consulting* adalah jasa yang bersifat pemberian nasihat, yang pada umumnya diselenggarakan berdasarkan permintaan spesifik dari klien. Ketika melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus selalu mempertahankan objektivitas dan tidak menerima atau mengambil alih tanggung jawab manajemen. Jasa asuransi/*assurance* merupakan kegiatan penilaian bukti secara objektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan-permasalahan lainnya. Sifat dan ruang lingkup suatu penugasan asuransi ditentukan oleh auditor internal (IIA, 2016).

Lingkup audit internal modern digambarkan oleh Sawyer's (2005:10) sebagai penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Peran Audit internal dalam pemerintah daerah dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. Pengawasan Intern adalah seluruh proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008).

Inspektorat kabupaten/kota sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan reuiu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menyakinkan keandalan informasi yang disajikan didalam LKPD sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Kegiatan audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*). Permenkeu Nomor 8/PMK.09/2015 Tahun 2015 tentang Standar reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

menjelaskan revidi atas LKPD merupakan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel Yang Digunakan	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Lasmar a dan Rahayu (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1. Kompetensi SDM 2. Perangkat Pendukung 3. Peran Auditor Internal	Regresi Linier Berganda	Kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.	Syarifu -din (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Structural Equation Modeling (SEM)	Kompetensi SDM dan peran audit intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas

		Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)	Variabel Independen: 1. Kompetensi SDM 2. Peran Audit Intern Variabel Intervening: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		laporan keuangan, sedangkan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SPIP dapat memediasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan SPIP tidak memediasi pengaruh peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Suwanda (2015)	<i>Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)</i>	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1. Penerapan SAP 2. Kualitas SDM 3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal 4. Komitmen Organisasi 5. Peman-	Regresi Linier Berganda	Secara simultan penerapan SAP, kualitas SDM, penerapan SPI, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial kualitas SDM, Penerapan

			faatan Teknologi Informasi		SPI, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Kurniawan (2016)	Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1. Kompetensi SDM 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Sistem Pengendalian Intern	Partial Least Square (PLS)	Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Fikri, dkk (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit	Variabel Dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan.	Regresi Linier Berganda	Penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal berpengaruh tidak signifikan

		Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Variabel Independen: 1. Penerapan SAP 2. Kompetensi SDM 3. Peran Audit Internal Variabel Moderating: Sistem Pengendalian Internal		terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating
6.	Kewo dan Afiah (2017)	<i>Does Quality of Financial Statement Affected by Internal Control System and Internal Audit?</i>	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: 1. Sistem Pengendalian Internal 2. Internal Audit	Path Analysis	Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan
7	Hadi dan Darwanis (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan.	Variabel Dependen: Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Variabel Independen: 1. Kompetensi SDM 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Komitmen Organisasi 4. Penerapan Pengendalian Intern	Regresi Linier Berganda	Kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan secara parsial dan simultan.

8	Febri, dkk (2019)	Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi empiris di Kota Jambi)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1. Penerapan SAP 2. Kompetensi SDM 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Variabel Intervening: Akuntabilitas	Path Analysis	Penerapan SAP dan SPIP melalui Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi SDM melalui akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
9	Fauziyah (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat daerah di Kota Serang)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2. Kompetensi Aparatur Pemerintah 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Moderasi: Sistem Pengendalian Internal	Moderated Regression Analysis (MRA)	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan

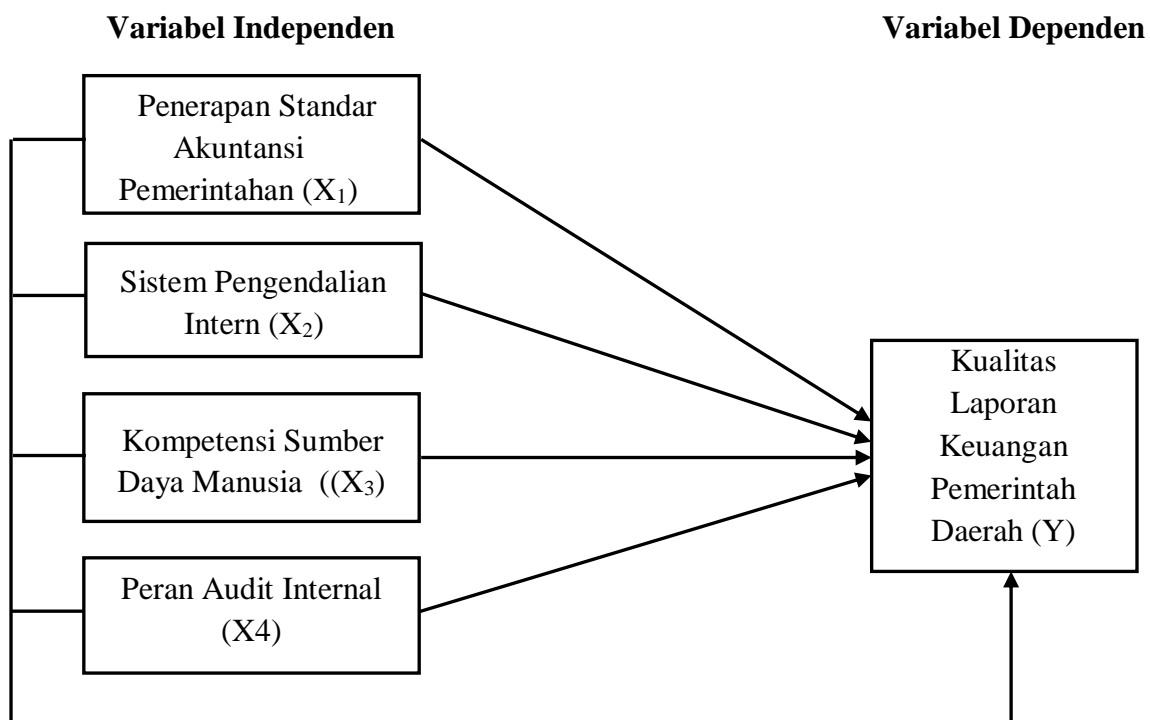
					keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak dapat memoderasi kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
10	Kabib, dkk (2021)	Apakah Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Peran Auditor Internal Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan?	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: 1. Penerapan SAP 2. Kompetensi SDM 3. Peran Auditor Internal	Regresi Linier Berganda	Penerapan SAP, kompetensi SDM dan peran auditor internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat untuk memperlihatkan hubungan antara masing-masing variabel dalam suatu penelitian. Kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2015).

Berdasarkan masalah penelitian, landasan teori dan reviu penelitian terdahulu, maka peneliti mengembangkan kerangka penelitian melalui kerangka konsep pada gambar 2.1

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu adanya hubungan antara faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik secara parsial maupun simultan yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (X₁), Sistem Pengendalian Intern (X₂), Kompetensi Sumber Daya

Manusia (X3) dan Peran Audit Internal (X4) sebagai variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen (Y). Hubungan antara variabel tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga semakin baik penerapan SAP akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang benar didalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan penyajian yang material dapat dihindari sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan disajikan secara berkualitas. SAP merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah (Mahmudi, 2010). SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian, 2006). Hal ini sejalan dengan penelitian Kabib, dkk (2021) yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial dan simultan.

2.3.2 Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang menerapkan unsur-unsur sistem pengendalian internal, akan tercermin dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dapat tercapai dan laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki tingkat keterandalan yang tinggi. Pengendalian intern bertujuan membuat laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*) (Tuanakotta, 2013). Hal ini sejalan dengan dengan hasil penelitian Hadi dan Darwanis (2017) dan Kewo, dkk (2017) yang membuktikan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan.

2.3.3 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan daerah, peran sumber daya manusia memegang peranan penting. Hal ini tercermin dari keterlibatan SDM dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.. Kualitas dan kinerja organisasi sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia, karena keberadaan manusia dalam suatu organisasi tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya (Halim, 2010). Kompetensi SDM dalam bidang akuntansi diperlukan untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga kekeliruan dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan

standar akuntansi pemerintahan dapat dihindarkan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut didukung oleh penelitian Lasmara dan Rahayu (2016) dan Kurniawan (2017) bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia.

2.3.4 Hubungan Peran Audit Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah memiliki tugas pokok dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam Organisasi Perangkat Daerah. Disamping itu audit internal selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lasmara dan Rahayu (2016), Kewo dan Afiah (2017), serta Kabib, dkk (2021) yang membuktikan bahwa peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial dan simultan.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan tersebut sebelumnya telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014). Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan
- H2: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan
- H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan
- H4: Peran Audit Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan
- H5: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal berpengaruh positif secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Penelitian kausal bertujuan untuk menguji hipotesis dan merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Erlina, 2011). Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel penerapan SAP, SPI, kompetensi SDM, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021.

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

No	Kegiatan	2021					
		Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Riset						
5	Penyusunan Data						
6	Analisa Data						
7	Bimbingan Skripsi						
8	Sidang Meja Hijau						

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok entitas yang lengkap berupa orang, kejadian atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu terkait dengan masalah penelitian (Erlina, 2011). Sampel merupakan bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki populasi yang harus dapat mewakili populasi tersebut (Sugiyono, 2014).

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai OPD yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Medan sebanyak 35 OPD yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 25 Dinas, dan 7 (tujuh) Badan, dimana masing-masing OPD akan diberikan 2 (dua) kuesioner untuk diisi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Bendahara SKPD sehingga jumlah populasi dalam penelitian berjumlah 70 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sensus, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Daftar Populasi dan Sampel penelitian ini tercantum pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian (Responden) Pada Pemerintah Kota Medan

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Populasi Penelitian	Sampel Penelitian
1	Sekretariat Daerah	2 orang	2 orang
2	Sekretariat DPRD	2 orang	2 orang
3	Inspektorat	2 orang	2 orang
4	Dinas Pendidikan	2 orang	2 orang
5	Dinas Kesehatan	2 orang	2 orang
6	Dinas Pekerjaan Umum	2 orang	2 orang
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	2 orang	2 orang
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	2 orang	2 orang
9	Dinas Sosial	2 orang	2 orang
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	2 orang	2 orang
11	Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran	2 orang	2 orang
12	Dinas Ketenagakerjaan	2 orang	2 orang
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	2 orang	2 orang

	Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
14	Dinas Ketahanan Pangan	2 orang	2 orang
15	Dinas Lingkungan Hidup	2 orang	2 orang
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 orang	2 orang
17	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	2 orang	2 orang
18	Dinas Perhubungan	2 orang	2 orang
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 orang	2 orang
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 orang	2 orang
21	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2 orang	2 orang
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	2 orang	2 orang
23	Dinas Perindustrian	2 orang	2 orang
24	Dinas Perdagangan	2 orang	2 orang
25	Dinas Pemuda dan Olahraga	2 orang	2 orang
26	Dinas Pariwisata	2 orang	2 orang
27	Dinas Kebudayaan	2 orang	2 orang
28	Dinas Perpustakaan	2 orang	2 orang
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 orang	2 orang
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 orang	2 orang
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 orang	2 orang
32	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 orang	2 orang
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2 orang	2 orang
34	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2 orang	2 orang
35	Badan Penelitian dan Pengembangan	2 orang	2 orang
Total Responden		70 orang	70 orang

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006).

Sebelum menetapkan variabel independen dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan uji pemilihan faktor dari beberapa variabel yang saling berhubungan atau memiliki pengaruh satu sama lain. Variabel-variabel yang

dipilih adalah variabel yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, teori, dan hasil pra riset peneliti. Variabel – variabel yang memiliki nilai uji faktornya $> 0,5$ yang dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), dan Peran Audit Internal (X4) serta variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan sebuah konstruk dengan menyatakan kegiatan yang ditimbulkannya atau prilaku yang dihasilkannya memberikan arti atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk tersebut dengan metode skala pengukuran dari masing-masing variabel (Lubis, 2016:89-90).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala interval yaitu skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat dan jarak konstruk yang diukur tetapi tidak menggunakan angka nol sebagai titik awal perhitungan dan bukan angka absolut (Erlina dan Mulyani, 2007). Skala interval biasanya diukur melalui instrumen kuesioner dengan Skala Likert yang merupakan metode untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena. Indriantoro dan Supomo (2002) menyatakan skala likert sebagai metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek, atau kejadian tertentu. Skala Likert umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu dengan skor

1 sampai 5, dimana dalam penelitian ini menggunakan alternatif jawaban yang sama untuk setiap variabel yaitu skor 5 (SS=Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (N= Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju) dan skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang dijelaskan dengan menggunakan 4 (empat) karakteristik kualitatif yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus dilaksanakan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi syarat sebagai laporan keuangan berkualitas yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Indikator variabel ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami yang diperoleh dari PP No. 71 Tahun 2010. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan 10 (sepuluh) butir pertanyaan yang diadaptasi dari Irwan (2011).

2. Variabel Independen

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP (X1)

Penerapan SAP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan SAP oleh pengelola keuangan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Penerapan SAP dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan 8 (delapan) butir pertanyaan yang diadaptasi dari Irwan (2011).

b. Sistem Pengendalian Intern/SPI (X2)

SPI adalah proses integral yang dirancang dan dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang meliputi 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan 9 (sembilan) butir pertanyaan yang diadaptasi dari Irwan (2011).

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yaitu memiliki kompetensi ataupun kapasitas dibidangnya berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya didalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas SDM dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner sebanyak 8 (delapan) butir pertanyaan yang diadaptasi dari Irwan, (2011).

d. Peran Audit Internal

Audit Internal adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Peran Audit Internal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner sebanyak 7 (tujuh) butir pertanyaan yang diadaptasi dari Riyanti (2015).

Ringkasan definisi operasional secara singkat dijelaskan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Indikator Penilaian: 1. Bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan 2. Laporan keuangan dapat mengoreksi dan memperbaiki 3. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan 4. Kelengkapan Informasi 5. Penyajian secara jujur 6. Laporan keuangan bebas dari salah pengertian dan kesalahan material 7. Laporan keuangan dapat diverifikasi 8. Laporan keuangan netral 9. Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 10. Laporan keuangan dapat dipahami (Irwan, 2011)	Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)	Interval
Variabel Independen Penerapan SAP (X1)	Indikator Penilaian : 1. Penyajian laporan keuangan berbasis aktual 2. Penyajian LRA berbasis kas 3. Penyajian CaLK secara lengkap 4. Pengakuan dan pencatatan persediaan 5. Pengakuan dan pencatatan asset tetap 6. Pengakuan dan pencatatan kewajiban	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang berkekuatan	Interval

	<p>7. Pelaksanaan koreksi kesalahan</p> <p>8. Pelaksanaan laporan keuangan konsolidasi</p> <p>(Irwan, 2011)</p>	<p>hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.</p> <p>(Bastian, 2006)</p>	
<p>Sistem Pengendalian Internal</p> <p>(X2)</p>	<p>Indikator Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan <p>(Irwan, 2011)</p>	<p>Merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memandai atas keteradalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.</p> <p>(PP No. 60 Tahun 2008)</p>	Interval
<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>(X3)</p>	<p>Indikator Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 2. Keahlian (<i>Skill</i>) 3. Perilaku (<i>attitude</i>) <p>(Irwan, 2011)</p>	<p>Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.</p> <p>(Keputusan KBKN No. 46A Tahun 2003)</p>	Interval
<p>Peran Audit Internal</p> <p>(X4)</p>	<p>Indikator Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap tingkat keandalan informasi keuangan 2. Penilaian tingkat ketaatan terhadap kebijakan dan 	<p>Merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan</p>	Interval

	prosedur 3. Penilaian kualitas penyajian informasi pertanggungjawaban keuangan 4. Berjalannya fungsi pengawasan 5. Menyakinkan ketaatan terhadap peraturan. 6. Mengidentifikasi tingkat terjadinya penyimpangan atau penyelewengan (Riyanti, 2015)	operasi organisasi <i>(The Institute of Internal Auditor, 1999)</i>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner karena jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dalam bentuk data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sesuai aslinya dan tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil 70 kuesioner yang ditunggu selama 7 hari. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana responden mengisi pertanyaan atau pernyataan tertulis kemudian setelah diisi dengan lengkap oleh responden dikembalikan kepada peneliti (Sugiyono, 2014). Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (sensus) karena semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014).

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem pengendalian intern (SPI) dan Kompetensi SDM bersumber dari adaptasi

penelitian oleh Irwan (2011), dan untuk variabel peran audit internal bersumber dari adaptasi penelitian oleh Riyanti (2015).

3.6 Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan kuesioner maka analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas data, multikolinearitas, heterokedastisitas), uji hipotesis (uji F, uji t dan uji determinasi) dan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Kuesioner yang telah diisi oleh responden sebelum dianalisis, terlebih dahulu dikuantitatifkan dengan menggunakan skala ukur interval dan menggunakan metode pembobotan Skala Likert, sehingga menghasilkan keluaran berupa angka. Selanjutnya angka tersebut dianalisis melalui aplikasi software program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*).

3.6.1 Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Data yang telah dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan pengujian statistik dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai mean, nilai standar deviasi dan lainnya.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Pada model penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer, sebelum dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis maka dilakukan uji kualitas data untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data dalam kuesioner. Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner, peneliti telah melakukan uji pendahuluan atau *Pilot Test* kepada 30 orang responden non sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel yaitu PNS yang bekerja dalam bidang pengelolaan keuangan dilingkungan pemerintah (lampiran 3). Pengujian kualitas data ini berupa uji validitas dan reliabilitas yaitu:

1. Uji validitas, digunakan untuk mendeteksi adakah pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/ditukar karena dianggap tidak relevan (Umar, 2009). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Jika r hitung (dapat dilihat pada kolom r hitung *Pearson Correlaton*) lebih besar dari r tabel (untuk *degree of freedom* $(df) = n - 2$ pada tabel r *Product Moment*) dengan signifikansi 5% dan bernilai positif, maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013).
2. Uji reliabilitas, digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten jika diulangi beberapa kali. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2013).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar model regresi dapat menjadi alat estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik meliputi:

1. Uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik ditunjukkan dengan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*, jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.
2. Uji multikolonieritas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2103). Untuk mendeteksi multikolonieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* ≥ 10 atau nilai *Tolerance* $\leq 0,10$.
3. Uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Erlina, 2011). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan analisis statistik uji *Glejser*, dengan kriteria probabilitas signifikansinya sebesar $> 0,05$ maka suatu data dikatakan terbebas dari penyimpangan heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.6.4 Model Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel dependen, dan 4 (empat) variabel independen. Hipotesis menguji apakah Penerapan SAP, SPI, Kompetensi SDM, dan Peran audit internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan menggunakan model regresi berganda.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu variabel independen terhadap variabel dependen dimana model regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Metode ini akan menguji tingkat signifikansi dari pengaruh semua variabel independennya. Persamaan regresi hipotesis yaitu sebagai berikut:

Dimana:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Y = Kualitas laporan keuangan

β_0 = Konstanta

X_1 = Penerapan SAP

X_2 = SPI

X_3 = Kompetensi SDM

X_4 = Peran Audit Internal

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_4$ = koefisien regresi

e = *error*

Untuk menguji model hipotesis digunakan pengujian hipotesis dengan koefisien determinasi (R^2), secara simultan dengan uji statistik F, dan secara parsial dengan uji statistik t sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh model dapat menerangkan variasi variabel dependen (Kuncoro, 2009). Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel dependen. Kelemahan R^2 , setiap penambahan satu variabel independen nilainya pasti meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menghindari bias terhadap jumlah variabel independen disarankan untuk memakai nilai *Adjusted* R^2 karena nilainya dapat naik atau turun jika satu variabel independen ditambahkan pada model (Ghozali, 2013).

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009). Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam Uji Statistik F adalah sebagai berikut:

H_0 : $\beta = 0$, Penerapan SAP, SPI, Kompetensi SDM, dan Peran Audit Internal secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_a : $\beta \neq 0$, Penerapan SAP, SPI, Kompetensi SDM, dan Peran Audit Internal,

secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dalam penelitian ini digunakan signifikansi 5% serta nilai *degree of freedom (df)* 1 dan *df* 2 untuk mencari nilai F tabel, dengan dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
- b. Jika F hitung $<$ F tabel, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

3. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Pengujian hipotesis secara parsial atau individual dilakukan dengan uji Statistik t. Menurut Kuncoro (2009) uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yaitu:

H_o : $\beta = 0$, Penerapan SAP, SPI, Kompetensi SDM, dan Peran Audit Internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_a : $\beta \neq 0$, Penerapan SAP, SPI, Kompetensi SDM, dan Peran Audit Internal secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dalam penelitian ini digunakan signifikansi 5% serta untuk mencari *t* tabel dengan *df* 2 = n-k dengan menggunakan tabel statistik. Nilai *t* tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t, dengan dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
- b. Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif dilakukan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta dan hubungan antar variabel penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data dengan menggunakan pengujian statistik dan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai rata-rata, nilai standar deviasi dan yang lainnya.

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil kuesioner yang disebar di lingkungan Pemerintah Kota Medan sebanyak 35 OPD yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 25 Dinas dan 7 (tujuh) Badan. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui google formulir yang dikirimkan kepada responden dan kuesioner yang diantar langsung, dimana responden diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari, setelah itu kuesioner dikumpulkan kembali oleh peneliti. Responden penelitian pada masing-masing OPD sebanyak 2 (dua) orang yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK-OPD dan Bendahara OPD. Penyebaran kuesioner sebanyak 70 set dan seluruh kuesioner diterima kembali dalam kondisi baik sehingga telah memenuhi syarat untuk proses pengolahan data yang dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Instansi	Sebar	Kembali		Tidak Kembali
				Baik	Rusak	
1	Sekretariat Daerah	1	2	2	-	-
2	Sekretariat DPRD	1	2	2	-	-
3	Inspektorat	1	2	2	-	-
4	Dinas	25	50	50	-	-
5	Badan	7	14	14	-	-
	Jumlah	35	70	70	-	-

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah)

4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkategorisasikan identitas responden berdasarkan karakteristik yang sudah ditentukan dalam penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat disajikan dengan tertata dan terstruktur dengan baik. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin

Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	39	55,7
Perempuan	31	44,3
Total	70	100,00

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 2)

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 39 orang (55,7%) sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 31 orang (44,3%) yang artinya dalam penelitian ini didominasi responden yang berjenis kelamin laki-laki.

2. Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SLTA/Sederajat	9	12,9
Diploma (D3)	6	8,6
Strata1(Sarjana)	40	57,1
Strata 2 (Master)	15	21,4
Total	70	100,00

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 2)

Dilihat dari pendidikan terakhir, responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan strata satu (S1), yaitu sebanyak 40 orang (57,1%), kemudian diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan strata dua (S2) sebanyak 15 orang (21,4%), dikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 9 orang (12,9%) sedangkan yang bertingkat pendidikan diploma (D3) sebanyak 6 orang (8,6%).

3. Karakteristik berdasarkan jurusan pendidikan

Adapun karakteristik responden berdasarkan jurusan pendidikan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Jurusan Pendidikan

Jurusan Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
Akuntansi	20	28,6
Non Akuntansi	50	71,4
Total	70	100,00

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 2)

Berdasarkan karakteristik jurusan pendidikan dapat dilihat bahwa responden yang memiliki jurusan pendidikan akuntansi berjumlah 20 orang

(28,6%) dan yang memiliki jurusan pendidikan non akuntansi berjumlah 50 orang (71,4%) yang artinya dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki jurusan pendidikan non akuntansi.

4. Karakteristik berdasarkan jabatan

Adapun karakteristik responden berdasarkan jabatan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Karakteristik Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
PPK SKPD/SKPKD	35	50,0
Bendahara SKPD	35	50,0
Total	70	100,00

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 2)

Berdasarkan karakteristik pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki jabatan PPK SKPD/SKPKD berjumlah 35 orang (50,0%) dan yang memiliki jabatan bendahara SKPD berjumlah 35 orang (50,0%) yang artinya dalam penelitian responden memiliki jumlah yang setara.

5. Karakteristik berdasarkan pangkat/golongan

Adapun karakteristik responden berdasarkan pangkat/golongan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Karakteristik Berdasarkan Pangkat / Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase (%)
Golongan II	8	11,4
Golongan III	53	75,7
Golongan IV	9	12,9
Total	70	100,00

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 2)

Berdasarkan karakteristik pangkat/golongan dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 53

orang (75,7%) diikuti oleh golongan IV sebanyak 9 orang (12,9%) dan golongan II sebanyak 8 orang (11,4%).

6. Karakteristik berdasarkan lama bekerja

Adapun karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7 Karakteristik Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
6 – 10 tahun	14	20,0
11 – 15 tahun	30	42,9
16 – 20 tahun	14	20,0
≥ 21 tahun	12	17,1
Total	70	100,00

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 2)

Berdasarkan lama bekerja para responden, sebanyak 30 orang (42,9%) memiliki masa kerja 11-15 tahun, 14 orang (20,0%) memiliki masa kerja 16-20 tahun, 14 orang (20,0%) memiliki masa kerja 6-10 tahun, sedangkan yang paling sedikit yaitu lama bekerja > 21 tahun sebanyak 12 orang (17,1%).

7. Karakteristik berdasarkan kursus/diklat/bimbingan

Adapun karakteristik responden berdasarkan kursus/diklat/bimbingan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Karakteristik Berdasarkan Kursus / Diklat / Bimbingan

Kursus/Diklat/Bimbingan	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Pernah	7	10,0
1 - 2 Kali	24	34,3
3 - 5 Kali	30	42,9
6 – 10 Kali	7	10,0
11 – 20 Kali	2	2,9
Total	70	100,00

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 2)

Berdasarkan keikutsertaan responden dalam mengikuti kursus/diklat/bimtek dibidang keuangan atau penyusunan laporan keuangan diketahui sebanyak 30 orang (42,9%) responden yang pernah mengikuti kursus/diklat/bimtek keuangan, sedangkan responden yang sama sekali tidak pernah mengikuti kursus/diklat/bimtek keuangan yaitu sebanyak 7 orang (10%).

4.1.3 Hasil Distribusi Jawaban Kuesioner

Distribusi jawaban kuesioner bertujuan untuk mendeskripsikan hasil seluruh jawaban responden terkait dengan pernyataan yang ada pada kuesioner penelitian yang terdiri dari 8 pernyataan untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, 9 pernyataan untuk variabel sistem pengendalian internal, 8 pernyataan untuk variabel kompetensi SDM, 7 pernyataan untuk variabel peran audit internal, dan 10 pernyataan untuk variabel kualitas laporan keuangan. Adapun distribusi jawaban kuesioner dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Adapun hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 4.9

Tabel 4.9 Hasil Distribusi Jawaban Responden untuk Kuesioner Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean	Ket.
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Butir Pernyataan SAP_1	12	17,1	23	32,9	16	22,9	14	20,0	5	7,1	3	N
Butir Pernyataan SAP_2	9	12,9	14	20,0	16	22,9	23	32,9	8	11,4	3	N

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean	Ket.
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Butir Pernyataan SAP_3	15	21,4	15	21,4	18	25,7	13	18,6	9	12,9	3	N
Butir Pernyataan SAP_4	7	10,0	15	21,4	17	24,3	23	32,9	8	11,4	3	N
Butir Pernyataan SAP_5	11	15,7	19	27,1	14	20,0	21	30,0	5	7,1	3	N
Butir Pernyataan SAP_6	11	15,7	15	21,4	19	27,1	16	22,9	9	12,9	3	N
Butir Pernyataan SAP_7	9	12,9	11	15,7	17	24,3	22	31,4	11	15,7	3	N
Butir Pernyataan SAP_8	5	7,1	14	20,0	20	28,6	18	25,7	13	18,6	3	N

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dari seluruh pernyataan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan Kota Medan rata-rata responden memilih jawaban netral, yang artinya dalam penelitian ini pegawai pemerintah Kota Medan menganggap bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah di Kota Medan saat ini biasa saja, tidak terlalu baik, tidak pula buruk, atau tidak mau memberi tanggapan lebih lanjut.

2. Hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner sistem pengendalian intern.

Adapun hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner sistem pengendalian intern dapat dilihat pada Tabel 4.10

Tabel 4.10 Hasil Distribusi Jawaban Responden untuk Kuesioner Sistem Pengendalian Intern

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean	Ket.
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Butir Pernyataan SPI_1	5	7,1	24	34,3	20	28,6	14	20,0	7	10,0	3	N
Butir Pernyataan SPI_2	7	10,0	16	22,9	23	32,9	18	25,7	6	8,6	3	N
Butir Pernyataan SPI_3	6	8,6	15	21,4	26	37,1	18	25,7	5	7,1	3	N
Butir Pernyataan SPI_4	9	12,9	20	28,6	13	18,6	20	28,6	8	11,4	3	N
Butir Pernyataan SPI_5	8	11,4	15	21,4	20	28,6	16	22,9	11	15,7	3	N
Butir Pernyataan SPI_6	15	21,4	15	21,4	16	22,9	18	25,7	6	8,6	3	N
Butir Pernyataan SPI_7	10	14,3	20	28,6	16	22,9	17	24,3	7	10,0	3	N
Butir Pernyataan SPI_8	14	20,0	21	30,0	15	21,4	16	22,9	4	5,7	3	N
Butir Pernyataan SPI_9	6	8,6	18	25,7	17	24,3	23	32,9	6	8,6	3	N

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner sistem pengendalian intern pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa dari seluruh pernyataan terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah Kota Medan rata-rata responden memilih jawaban netral, yang artinya dalam penelitian ini pegawai pemerintahan Kota Medan menganggap bahwa sistem pengendalian intern Kota

Medan saat ini biasa saja, tidak terlalu baik, tidak pula buruk, atau tidak mau memberi tanggapan lebih lanjut.

3. Hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner kompetensi sumber daya manusia.

Adapun hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 4.11

Tabel 4.11 Hasil Distribusi Jawaban Responden untuk Kuesioner Kompetensi Sumber Daya Manusia

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean	Ket.
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Butir Pernyataan SDM_1	7	10,0	18	25,7	28	40,0	13	18,6	4	5,7	3	N
Butir Pernyataan SDM_2	9	12,9	19	27,1	17	24,3	16	22,9	9	12,9	3	N
Butir Pernyataan SDM_3	9	12,9	26	37,1	16	22,9	15	21,4	4	5,7	3	N
Butir Pernyataan SDM_4	12	17,1	20	28,6	21	30,0	7	10,0	10	14,3	3	N
Butir Pernyataan SDM_5	4	5,7	23	32,9	22	31,4	15	21,4	6	8,6	3	N
Butir Pernyataan SDM_6	12	17,1	14	20,0	21	30,0	17	24,3	6	8,6	3	N
Butir Pernyataan SDM_7	5	7,1	20	28,6	21	30,0	13	18,6	11	15,7	3	N
Butir Pernyataan SDM_8	6	8,6	18	25,7	15	21,4	20	28,6	11	15,7	3	N

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner kompetensi sumber daya manusia pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa rata-rata responden memilih jawaban netral, yang artinya dalam penelitian ini pegawai pemerintah Kota Medan menganggap bahwa kompetensi sumber daya manusia Kota Medan saat ini biasa saja, tidak terlalu baik, tidak pula buruk, atau tidak mau memberi tanggapan lebih lanjut.

4. Hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner peran audit internal

Adapun hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner peran audit internal dapat dilihat pada Tabel 4.12

Tabel 4.12 Hasil Distribusi Jawaban Responden untuk Kuesioner Peran Audit Internal

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean	Ket.
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Butir Pernyataan AI_1	9	12,9	14	20,0	19	27,1	13	18,6	15	21,4	3	N
Butir Pernyataan AI_2	9	12,9	16	22,9	16	22,9	16	22,9	13	18,6	3	N
Butir Pernyataan AI_3	4	5,7	13	18,6	21	30,0	21	30,0	11	15,7	3	N
Butir Pernyataan AI_4	11	15,7	17	24,3	16	22,9	22	31,4	4	5,7	3	N
Butir Pernyataan AI_5	7	10,0	18	25,7	16	22,9	20	28,6	9	12,9	3	N
Butir Pernyataan AI_6	5	7,1	14	20,0	21	30,0	21	30,0	9	12,9	3	N
Butir Pernyataan AI_7	8	11,4	19	27,1	14	20,0	16	22,9	13	18,6	3	N

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner peran audit internal pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa dari seluruh pernyataan terkait dengan peran audit internal pemerintah Kota Medan rata-rata responden memilih jawaban netral, yang artinya dalam penelitian ini pegawai pemerintah Kota Medan menganggap bahwa peran audit internal pemerintah di Kota Medan saat ini biasa saja, tidak terlalu baik, tidak pula buruk, atau tidak mau memberi tanggapan lebih lanjut.

5. Hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner kualitas laporan keuangan.

Adapun hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.13 Hasil Distribusi Jawaban Responden untuk Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean	Ket.
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Butir Pernyataan LK_1	0	0,0	5	7,1	53	75,7	12	17,1	0	0,0	3	N
Butir Pernyataan LK_2	7	10,0	15	21,4	17	24,3	23	32,9	8	11,4	3	N
Butir Pernyataan LK_3	0	0,0	7	10,0	55	78,6	8	11,4	0	0,0	3	N
Butir Pernyataan LK_4	6	8,6	18	25,7	17	24,3	23	32,9	6	8,6	3	N
Butir Pernyataan LK_5	0	0,0	4	5,7	62	88,6	4	5,7	0	0,0	3	N
Butir Pernyataan LK_6	4	5,7	23	32,9	22	31,4	15	21,4	6	8,6	3	N

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean	Ket.
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Butir Pernyataan LK_7	0	0,0	7	10,0	49	70,0	14	20,0	0	0,0	3	N
Butir Pernyataan LK_8	7	10,0	16	22,9	23	32,9	18	25,7	6	8,6	3	N
Butir Pernyataan LK_9	7	10,0	18	25,7	28	40,0	13	18,6	4	5,7	3	N
Butir Pernyataan LK_10	8	11,4	19	27,1	14	20,0	16	22,9	13	18,6	3	N

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden untuk kuesioner kualitas laporan keuangan pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa dari seluruh pernyataan terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan Kota Medan rata-rata responden memilih jawaban netral, yang artinya dalam penelitian ini pegawai pemerintah Kota Medan menganggap bahwa kualitas laporan keuangan di Kota Medan saat ini biasa saja, tidak terlalu baik, tidak pula buruk, atau tidak mau memberi tanggapan lebih lanjut.

4.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data perlu dilakukan sebelum melakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas sumber data, konsistensi dan keakuratan data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Pengujian kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas.

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji valid tidaknya setiap item pertanyaan pada kuesioner untuk masing-masing variabel. Item pertanyaan akan terbukti valid jika nilai r hitung $>$ r tabel (Ghozali, 2013). Nilai r hitung dapat dilihat pada kolom r hitung *Pearson Correlation*, sedangkan nilai r tabel dapat diperoleh dari *degree of freedom* (df)= $n-2$ dimana n merupakan jumlah responden yaitu sebanyak 70 orang, sehingga nilai df yaitu 68 dengan taraf signifikansi 5% maka nilai r tabel dari tabel *r Product Moment* dengan uji dua sisi yaitu 0,235. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.14

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel

No.	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Keputusan
Sistem Akuntansi Pemerintahan					
1	SKPD/SKPKD menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas	0,961	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	SKPD/SKPKD menggunakan anggaran berbasis kas dalam penyajian LRA yaitu pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	0,967	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	SKPD/SKPKD menyajikan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara lengkap penjelasan-penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan	0,967	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	SKPD/SKPKD mengakui persediaan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik	0,967	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

No.	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Keputusan
5	SKPD/SKPKD mengakui dan mencatat aset tetap sebesar biaya perolehannya/nilai wajar pada saat perolehan	0,948	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	SKPD/SKPKD mengakui dan mencatat kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul	0,387	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	SKPD/SKPKD melakukan koreksi terhadap setiap kesalahan yang ditemukan berdasarkan SAP	0,407	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
8	Laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Kota Medan telah mencakup laporan keuangan dari semua SKPD	0,656	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Sistem Pengendalian Internal					
9	SKPD/SKPKD mempunyai struktur organisasi dan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah menggambarkan pemisahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan	0,969	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
10	SKPD/SKPKD melakukan pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi	0,985	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
11	SKPD/SKPKD melakukan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan kebijakan, prosedur atau aturan perilaku	0,942	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
12	SKPD/SKPKD mempunyai penganggaran yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi berdasarkan SAP	0,985	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
13	SKPD/SKPKD mempunyai rencana pengelolaan keuangan dalam mengurangi risiko	0,960	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

No.	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Keputusan
	pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi				
14	Pada SKPD/SKPKD, setiap kegiatan/transaksi yang telah dicatat dan dentry ke SIMDA terlebih dahulu telah diotorisasi dan mempunyai bukti yang cukup	0,926	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
15	SKPD/SKPKD mempunyai kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset yang telah ditetapkan, diimplementasikan dan dikomunikasikan ke seluruh pegawai	0,583	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
16	SKPD/SKPKD mempunyai mekanisme yang memungkinkan informasi sampai ke seluruh bagian SKPD, masyarakat, rekanan dan aparat pengawasan intern dalam memberikan masukan yang signifikan	0,931	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
17	SKPD/SKPKD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan menindaklanjuti apabila ada temuan dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat	0,976	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia					
18	Saya memahami dengan baik tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai PPK-SKPD/Bendahara.	0,870	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
19	Saya memahami dengan baik prosedur dan proses akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.	0,983	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
20	Saya memahami dengan baik tentang peraturan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah	0,956	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

No.	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Keputusan
21	Saya memahami dengan baik tentang kebijakan akuntansi di Pemerintahan Kota Medan	0,982	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
22	Saya mampu membuat jurnal, menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik	0,947	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
23	Saya mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah	0,983	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
24	Saya bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum	0,952	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
25	Saya menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan	0,975	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Peran Audit Internal					
26	Auditor internal (Inspektorat) selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada dasarnya memberikan jasa konsultasi pada satuan kerja Bapak/Ibu dalam membantu menilai keakuratan dan keandalan informasi dari laporan keuangan yang telah disusun	0,962	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
27	Auditor Internal juga menilai ketaatan terhadap prosedur dan kebijakan dalam menyusun laporan keuangan	0,908	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
28	Pemeriksaan internal yang dilakukan membantu saya dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas	0,957	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
29	Aktivitas pengawasan yang baik sangat membantu saya dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas	0,956	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
30	Proses pengawasan yang baik akan mengurangi kesalahan dalam menyusun laporan	0,969	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

No.	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Keputusan
	keuangan				
31	Adanya pengawasan yang baik dari auditor internal memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	0,696	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
32	Audit internal dapat mengidentifikasi sejak awal terjadinya kesalahan/ penyelewengan pada satuan kerja Bapak / Ibu	0,768	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Kualitas Laporan Keuangan					
33	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan	0,888	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
34	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan masa lalu dan memprediksi masa yang akan datang	0,415	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
35	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD disajikan tepat waktu	0,899	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
36	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD disajikan secara lengkap	0,449	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
37	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD menyajikan fakta secara jujur	0,880	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
38	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material	0,877	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
39	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD dapat diverifikasi/ ditelusuri kebenarannya	0,922	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
40	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD telah memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dan tidak	0,853	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

No.	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Keputusan
	berpihak pada kepentingan pihak tertentu				
41	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya	0,879	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
42	Laporan keuangan SKPD/ SKPKD dapat dipahami para pengguna laporan keuangan	0,908	0,235	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 5)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.14 dari seluruh pernyataan kuesioner yang berjumlah 42 pernyataan menunjukkan perolehan hasil nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,235 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan tersebut yang berjumlah 42 pernyataan telah valid atau meyakinkan dan dapat digunakan sebagai sebuah sumber data analisis.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal yaitu jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas sumber data yang dalam penelitian ini adalah kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.15

Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel
Reliability Statistic

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1)	0,909	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X_2)	0,977	0,70	Reliabel
Kompetensi SDM (X_3)	0,987	0,70	Reliabel
Peran Audit Internal (X_4)	0,956	0,70	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,903	0,70	Reliabel

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 5)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dari seluruh pernyataan kuesioner yang berjumlah 42 pernyataan menunjukkan perolehan hasil nilai *cronbach's alpha* memiliki nilai $> 0,7$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan tersebut yang berjumlah 42 pernyataan telah reliabel atau meyakinkan dan dapat digunakan sebagai sebuah sumber data analisis.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk dapat digunakan sebagai model analisis seluruh data tersebut harus memenuhi syarat uji asumsi klasik, yang diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Adapun uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu analisis statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* dan analisis grafik dengan P-P Plot yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Statistik

Pengujian data dengan menggunakan analisis statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu dengan melihat probabilitas

asympt.sig (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2013) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.16

**Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

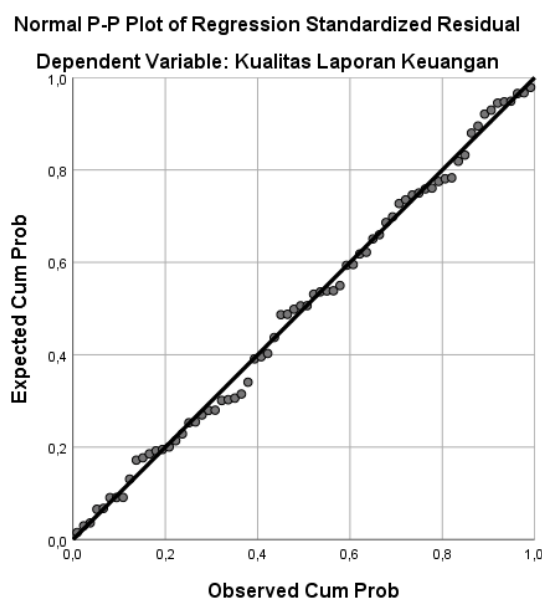
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,36064131
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,062
	Positive	,062
	Negative	-,043
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 6)

Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa perolehan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,20 > 0,05$ yang artinya bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak digunakan sebagai model regresi linear berganda. Kemudian untuk lebih meyakinkan agar tidak terjadi kesalahan dilakukan pengujian normalitas dengan P-P Plot yang dapat dilihat pada Gambar 4.1

Gambar 4.1 Grafik Normalitas dengan P-P Plot



Berdasarkan hasil uji normalitas dengan P-P Plot pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa plot menyebar searah dengan garis diagonal atau bentuk plot mengikuti garis diagonal, yang artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak digunakan sebagai model regresi linear berganda karena dari kedua model pengujian hasilnya memiliki kesamaan atau selaras.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan yang erat) antar variabel independen yang dapat dinilai dengan melihat besaran VIF (*varians inflation factor*) ≥ 10 dan nilai *Tolerance* $< 0,10$ (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.17

Tabel 4.17. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,218	4,385			
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	,397	,088	,437	,931	1,074
Sistem Pengendalian Intern	,252	,083	,290	,956	1,046
Kualitas Sumber Daya Manusia	,242	,118	,196	,949	1,054
Peran Audit Internal	,250	,091	,258	,983	1,017

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 6)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,93 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $1,07 < 10$, variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,95 > 0,1$ dengan nilai VIF

sebesar $1,04 < 10$ selanjutnya variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,94 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $1,05 < 10$ dan variabel peran audit internal memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,98 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $1,01 < 10$. Hal tersebut memberikan arti bahwa seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian ini tidak memiliki multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga data layak digunakan sebagai model regresi linear berganda.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain, model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik uji *Glejser* dengan kriteria apabila probabilitas signifikansinya sebesar $> 0,05$ maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Hasil uji statistik dapat dilihat pada Tabel 4.18

Tabel 4.18 Uji *Glejser* Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,066	2,523		2,008	,049
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	-,028	,050	-,071	-,562	,576
Sistem Pengendalian Intern	-,024	,048	-,063	-,503	,617
Kualitas Sumber Daya Manusia	-,048	,068	-,089	-,711	,480
Peran Audit Internal	,033	,052	,079	-,636	,527

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 6)

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,57 > 0,05$, variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,61 > 0,05$, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki signifikansi sebesar $0,48 > 0,05$ dan variabel peran audit internal memiliki signifikansi sebesar $0,52 > 0,05$. Hal tersebut memberikan arti bahwa seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian ini tidak memiliki heteroskedastisitas antar variabel, sehingga data layak digunakan sebagai model regresi linear berganda.

4.4 Regresi Linear Berganda

Setelah seluruh data dalam penelitian ini memenuhi seluruh uji asumsi klasik, maka dilakukan regresi linear berganda. Adapun hasil regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.19

Tabel 4.19 Hasil Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,218	4,385		,734	,466		
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	,397	,088	,437	4,532	,000	,931	1,074
Sistem Pengendalian Intern	,252	,083	,290	3,046	,003	,956	1,046
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,242	,118	,196	2,056	,044	,949	1,054
Peran Audit Internal	,250	,091	,258	2,753	,008	,983	1,017

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 7)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada Tabel 4.19 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,218 C + 0,397 X_1 + 0,252 X_2 + 0,242 X_3 + 0,250 X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), dan Peran Audit Internal (X4) memiliki regresi yang positif. Hal ini menunjukkan hubungan antara Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi SDM, dan Peran Audit Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah searah, yang berarti jika semakin tinggi/baik Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi SDM dan Peran Audit Internal maka semakin tinggi/baik pula Kualitas Laporan Keuangan.

Melalui persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3,218 memberikan arti apabila nilai variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, peran audit internal adalah 0 (nol) atau tetap, maka nilai variabel kualitas laporan keuangan adalah sebesar 3,218.
2. Nilai koefisien variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,397 memberikan arti apabila nilai variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan naik sebesar 1 (satu), maka nilai variabel kualitas laporan keuangan juga akan naik sebesar 0,397. Nilai koefisien yang positif memberikan arti bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki hubungan yang positif dengan variabel kualitas laporan keuangan.

3. Nilai koefisien variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,252 memberikan arti apabila nilai variabel sistem pengendalian intern naik sebesar 1 (satu), maka nilai variabel kualitas laporan keuangan juga akan naik sebesar 0,252. Nilai koefisien yang positif memberikan arti bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki hubungan yang positif dengan variabel kualitas laporan keuangan.
4. Nilai koefisien variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,242 memberikan arti apabila nilai variabel kompetensi sumber daya manusia naik sebesar 1 (satu), maka nilai variabel kualitas laporan keuangan juga akan naik sebesar 0,242. Nilai koefisien yang positif memberikan arti bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang positif dengan variabel kualitas laporan keuangan.
5. Nilai koefisien variabel peran audit internal sebesar 0,250 memberikan arti apabila nilai variabel peran audit internal naik sebesar 1 (satu), maka nilai variabel kualitas laporan keuangan juga akan naik sebesar 0,250. Nilai koefisien yang positif memberikan arti bahwa variabel peran audit internal memiliki hubungan yang positif dengan variabel kualitas laporan keuangan.

4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis dalam penelitian ini, sehingga diketahui hasil dari analisis yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uji signifikansi parsial (uji-t)

Pengujian statistik t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi SDM, dan Peran Audit Internal terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan.

Pengambilan keputusan atas hasil pengujian berdasarkan pada kriteria nilai signifikansi sebesar 5% dengan nilai t tabel sebesar 1,668 dimana jika:

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak H_0 diterima

Adapun hasil uji signifikansi parsial (uji-t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.20.

**Tabel 4.20 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,218	4,385		,734	,466
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	,397	,088	,437	4,532	,000
Sistem Pengendalian Intern	,252	,083	,290	3,046	,003
Kualitas Sumber Daya Manusia	,242	,118	,196	2,056	,044
Peran Audit Internal	,250	,091	,258	2,753	,008

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 7)

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji-t) pada Tabel 4.20 dapat dilihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diuraikan sebagai berikut:

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai t_{hitung} sebesar $4,532 > t_{tabel}$ 1,668 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ serta koefisien regresi bernilai positif maka H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai t_{hitung} sebesar $3,046 > t_{tabel}$ $1,668$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ serta koefisien regresi bernilai positif maka H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,056 > t_{tabel}$ $1,668$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,04 < 0,05$ serta koefisien regresi bernilai positif maka H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Variabel peran audit internal memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,753 > t_{tabel}$ $1,668$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ serta koefisien regresi bernilai positif maka H4 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel peran audit internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

2. Uji signifikansi simultan (uji-F)

Pengujian statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Intern, Kompetensi SDM, dan Peran Audit Internal terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun hasil uji signifikansi simultan (uji-F) dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.21.

**Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	298,974	4	74,744	12,635	,000 ^b
	Residual	384,511	65	5,916		
	Total	683,486	69			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 7)

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji-F) pada Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa perolehan nilai F_{hitung} sebesar $12,63 > F_{tabel}$ 2,36 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ maka H_5 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal secara serempak (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh model dapat menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel dependen.

Adapun hasil koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.22.

**Tabel 4.22 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,661 ^a	,437	,403	2,432

a. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (data diolah pada lampiran 7)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 4.22 dapat dilihat bahwa perolehan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,403 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal memiliki kontribusi sebesar 40,3% terhadap variabel kualitas laporan keuangan sedangkan selebihnya sebesar 59,7% lagi dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Audit Internal merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pengguna sebagai evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.6.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan hasil uji

signifikansi parsial (uji-t) dengan perolehan nilai t_{hitung} sebesar $4,532 > t_{tabel}$ 1,668 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dan koefisien regresi 0,397. Pengaruh positif menunjukkan bahwa Penerapan SAP searah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana semakin meningkatnya penerapan SAP, maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya, semakin menurunnya penerapan SAP maka akan semakin menurun juga kualitas laporan keuangan daerah. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa Penerapan SAP mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa SAP merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintah (Mahmudi, 2010). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabib,dkk (2021) yang menyatakan penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, dkk (2016) yang menyatakan penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan SAP yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pemerintah kota Medan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Medan.

4.6.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah, berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji-t) dengan perolehan nilai t_{hitung} sebesar $3,046 > t_{tabel}$ 1,668 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dan koefisien regresi 0,252. Pengaruh positif menunjukkan bahwa SPI searah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana semakin meningkatnya SPI, maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk membuat laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*) (Tuanakotta, 2013). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kewo dan Afiah (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Kurniawan (2016) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini membuktikan bahwa dengan memaksimalkan sistem pengendalian intern maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan, karena sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah kota Medan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan diantaranya adalah keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.6.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji-t) dengan perolehan nilai t_{hitung} sebesar $2,056 > t_{tabel}$ $1,668$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,04 < 0,05$ dan koefisien regresi $0,242$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dimana kompetensi sumber daya manusia dalam hal pemerintah sebagai agen, mempunyai kewajiban untuk menyajikan dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada publik dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit BPK dan disampaikan kepada DPRD yang merupakan representasi perwakilan rakyat. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasmara dan Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Syarifudin (2014) yang menyatakan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil ini membuktikan bahwa dengan memaksimalkan atau meningkatkan kompetensi sumber daya manusia maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan, karena kompetensi sumber daya manusia atau pegawai dalam pemerintahan mencerminkan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang dapat ditunjukkan, atau diberikan oleh pegawai terhadap pemerintahan daerah Kota Medan. Sehingga apabila kompetensi

sumber daya manusia pada pemerintahan daerah Kota Medan meningkat akan memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.

4.6.4 Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji-t) dengan perolehan nilai t_{hitung} sebesar $2,753 > t_{tabel}$ 1,668 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dan koefisien regresi 0,250.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola yang baik (IIA, 1999). Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasmara dan Rahayu (2016) dan Kabib, dkk (2021) yang membuktikan bahwa peran auditor internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Syarifuddin (2014) yang menyatakan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil ini membuktikan bahwa dengan memaksimalkan atau meningkatkan peran audit internal maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan, karena dalam hal ini peran audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam pemerintahan dengan tujuan

untuk mengaudit, mereviu, mengevaluasi dan mengawasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan daerah Kota Medan untuk membantu pimpinan dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif atas seluruh kegiatan pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peran Audit Internal selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah akan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Oleh karena itu dengan memaksimalkan peran audit internal dalam pemerintahan daerah Kota Medan maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.

4.6.5 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa secara serempak (simultan) penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.. Hal tersebut diasumsikan berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji-F) dengan perolehan nilai F_{hitung} sebesar $12,63 > F_{tabel}$ 2,36 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Selain itu juga diketahui berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, dan peran audit internal memiliki kontribusi sebesar 40,3% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan, sedangkan selebihnya sebesar 59,7% lagi dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.
4. Peran audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.
5. Penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Medan harus fokus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, karena hal ini memiliki pengaruh yang paling kecil diantara variabel lainnya. Sumber daya manusia yang kompeten yang

memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang baik diperlukan didalam pengelolaan keuangan daerah, karena yang menerapkan SAP dan SPI adalah SDM. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan keuangan ataupun bimbingan teknis mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta adanya pendampingan dari BPKP ataupun BPK agar penerapan SAP dan SPI pada masing-masing OPD sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 dan PP No. 60 Tahun 2008. Selain itu perlu ditinjau kembali penempatan pegawai yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi sebagai PPK dan Bendahara OPD. Agar laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat terwujud.

2. Bagi Pemerintah Kota Medan, perlu untuk meningkatkan peran audit internal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan OPD yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan meningkatkan kompetensi auditor ataupun menambah jumlah auditor.
3. Bagi Peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan variabel-variabel lainnya diluar penelitian ini seperti sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi, budaya kerja dan lain-lain agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Bagi Peneliti selanjutnya sebaiknya menggabungkan metode pengumpulan data kuesioner dengan wawancara, agar tidak ada perbedaan persepsi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan didalam kuesioner, dan

responden dapat menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar informasi yang diperoleh akan lebih maksimal.

5. Bagi kampus agar terus memberikan webinar-webinar tentang sistem pengelolaan keuangan pemerintah agar mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, hlm 262.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
.....2006. *Audit Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I, Pemeriksaan Laporan Keuangan*, Jakarta.
.....2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Laporan Keuangan*, Jakarta.
.....2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Laporan Keuangan*, Jakarta.
.....2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Laporan Keuangan*, Jakarta.
.....2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Laporan Keuangan*, Jakarta.
.....2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Laporan Keuangan*, Jakarta.
- Erlina. 2011. *Metodologi Penelitian*. Medan: USU Press.
- Erlina, dan Mulyani, S. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: USU Press
- Fauziyah, Mardiyatul. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*. ISSN 2548-7078 (paper) ISSN 2656-4726 (online). Vol.4 No.2.
- Febri, Dwi; Rahayu, Sri; dan Wiralestari. 2019. Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDm dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening Studi Empiris Di Kota Jambi.
- Fikri, M.A; Inapty, B.A.; dan Martiningsih, RR.S.P. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, *Jurnal Ilmu Akuntansi*. ISSN 1979-858X (paper) ISSN 2461-1190 (online). Vol.9 No.1.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi dan Darwanis. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Penerapan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*. ISSN 1693-3397. Vol. 10, No. 2.

Halim, Abdul. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Ikhsan, Arfan dan Ghozali, Imam. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: PT. Madju Medan Cipta

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE

Indriasih, D. 2014. “*The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government*”. *Research Journal of Finance and Accounting*. ISSN 2222-1697 (paper) ISSN 2222-2847 (online) Vol.5 No. 20.

Irwan, Deri. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, *Tesis, Universitas Negeri Padang, Padang*.

Jensen, M. C. and Meckling, W. H . 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. Oktober, Vol. 5 No. 4, pp. 305-360.

Jones, P. 2014. *Public Sector Auditing: Partical Thecniques for an Integrated Approach*. London: Chapman & Hall/CRC.

Kabib, Nur; Nurhayati, Siti; dan Fatimatuzzahra, Siti. 2021. Apakah Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Peran Auditor Internal Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan?. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 21 No.2.

Kharis, Abdul. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT Avia Avian. *Skripsi. UPN Veteran, Jawa Timur*.

Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Riviui Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No.8 Tahun 2015 tentang *Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 46A Tahun 2003 tentang *Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil*.

- Kewo, Cecelia; dan Afiah, Nunuy. 2017. *Does Quality of Financial Statement Affected by Internal Control System and Internal Audit. International Journal of Economics and Financial Issues. ISSN 2146-4138. Vol.7 No.2.*
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Edisi Ketiga).* Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Indra. 2016. Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen. ISSN 1907-3011 (paper) ISSN 2528-1127 (online).* Vol.13. No.1.
- Lane, Jan Erik. 2003. *Manajemen and Public Organization: The Principal-Agent Framework. University of Geneva and National University of Singapore.*
- Lasmara, Freddie; dan Rahayu, Sri. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. ISSN 2338-4603 (paper) ISSN 2355-8520 (online).* Vol. 3. No.4.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sasaran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan.* Vol. 2, No.1.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik,* 8(2), 15-25.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah.*
-, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
-, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*
-, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.*
-, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*
-, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal.*
- Rai, IG.A. 2011. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanti, Y. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Internal Audit Terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Mahkamah Syariah di Aceh. *Tesis. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.*

- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sawyer, Lawrence B. 2005. *Internal Auditing*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, Uma, 2006. *Research Methods For Business*, Edisi empat, Terjemahan Yon, Kwan. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyowati, Lilis. Ishtika, Dan Pratiwi. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, Volume 20, No.2. Hal. 179-191.
- Siregar, O. K. (2020). Analysis of Fiscal Policy and Fertility in Provincial Government of Indonesia. *International Journal of Science and Business*, 4(3), 1-17.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Suwanda, Dadang. 2015. *Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK)*. *Research Journal of Finance and Accounting*. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online). Vol.6, No.4.
- Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM Dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*. Vol. 14. No. 2.
- Tawaqal, Irzal dan Suparno. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi*. E-ISSN 2581-1002. Vol. 2 No. 4.
- The Institute of Internal Auditors (IIA). 1999. *Standart for the Professional Practice Internal Auditing*, Florida: The IIA Research Foundation.
- Tuanakotta, T. M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umar, H., Partahi, D., & Purba, R. B. (2020). Fraud diamond analysis in detecting fraudulent financial report. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6638-6646.

Warisno. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis. Universitas Sumatera Utara.*

Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. SNA XIII Purwokerto.